

## Peran Kelembagaan Lokal Dalam Upaya Pelestarian Cagar Alam Faruhumpenai Kabupaten Luwu Timur

Asikin Muchtar<sup>1\*</sup>, Novi Sulistyowati<sup>1</sup>, Abd.Kadir<sup>1</sup>, Wahyullah<sup>1</sup>, Ummu Kultsum<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Indonesia Timur, Jl.Rappocini Raya No.171

\*Email: [muchtar.asikin@yahoo.com](mailto:muchtar.asikin@yahoo.com)

**ABSTRACT.** *This research aims to explore the role of local institutions in maintaining and protecting the Faruhumpenai Nature Reserve forest area. The aim is to identify the challenges and obstacles faced by local institutions in efforts to preserve these forest areas. Apart from that, this research will also evaluate the efforts made by each institution to preserve the Faruhumpenai Nature Reserve forest area. Data was collected around the Faruhumpenai Nature Reserve Area which is located in Mangkutana District, East Luwu Regency, South Sulawesi Province. The research was conducted using a qualitative approach for primary and secondary data. The method used is a case study method with a deliberate sample selection approach. Primary data was obtained through interviews with leaders such as chairman, secretary and important members of local institutions, with a total of 25 respondents. The research results show that the role of local institutions is to hold outreach programs and plant trees in the Faruhumpenai Nature Reserve area, acting as government partners in environmental conservation efforts. However, local institutions face various obstacles and obstacles in preserving nature in the Faruhumpenai Nature Reserve forest area, including a lack of human resource capacity, frequent differences of opinion, lack of knowledge about information technology in the digital era, as well as the challenges of egoism and lack of financial support. . However, local institutions have made efforts such as outreach about flood and landslide prevention, planting trees in the area, as well as holding clean-up activities with waste and river management.*

**Key words:** *Local Institutions, Nature Reserves, Forest Conservation*

DOI: 10.24259/jhm.v16i1.34103

### 1. PENDAHULUAN

Hutan dan komunitas sekitarnya merupakan dua elemen krusial dalam ekosistem yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan. Kehadiran sumber daya hutan yang lestari diharapkan dapat memastikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, sementara di sisi lain, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam memelihara kelestarian hutan di daerah tersebut. Komitmen masyarakat dalam menjaga dan

merawat lingkungan sebagai bagian penting dari kehidupan mereka mendorong untuk terlibat secara langsung dalam upaya pengelolaan hutan di sekitarnya.

Terlibatnya masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan melalui struktur kelembagaan lokal tidak selalu menjamin kelangsungan pengelolaan sumber daya hutan. Masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum berhasil meningkatkan kinerja pengelolaan hutan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Bahkan, cadangan potensi hutan seperti kayu dapat mengalami penurunan. Berbagai bentuk kelembagaan lokal, baik yang disusun oleh pihak yang memberdayakan masyarakat atau oleh masyarakat sendiri, menghasilkan kinerja pengelolaan sumber daya hutan yang beragam secara signifikan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sering kali berhasil. Selain itu, keberhasilan pengelolaan hutan bersama masyarakat juga ditentukan oleh aspek kelembagaan. Peran penting kelembagaan lokal dalam memastikan kelangsungan pengelolaan hutan menunjukkan perlunya penelitian yang memfokuskan pada peran kelembagaan lokal dalam menjaga keberlanjutan hutan. Karena itu kehadiran kelembagaan lokal menjadi salah satu jalan keluar karena dapat memitigasi dampak tersebut dan mengkoordinasikan penggunaan sumberdaya lokal di desa (Rani & Angraini, 2015).

Kelembagaan lokal merupakan gabungan antara organisasi, jaringan, dan hubungan yang membuka peluang untuk masyarakat dalam mengambil tindakan kolektif sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka (Baccini & Koenig, 2014). Kelembagaan lokal pada dasarnya merupakan sebuah organisasi yang terbentuk dalam lokalitas tertentu untuk melayani kebutuhan anggotanya. Tujuan utama berdirinya lembaga lokal adalah guna memenuhi kebutuhan komunitasnya secara lembaga secara khusus serta menciptakan kesejahteraan di dalamnya (Huda, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih & Nugraha (2018), kelembagaan lokal memainkan peran penting dalam pengembangan dan

pelestarian sumberdaya alam. Pengembangan ini berdampak positif pada perekonomian masyarakat setempat, dengan peningkatan pendapatan dan munculnya berbagai usaha baru berkat adanya desa wisata. Selain itu, Maria dan Darwis (2022) mengungkapkan bahwa pemanfaatan sumber daya lokal memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan program pelestarian alam sesuai dengan kemampuan mereka. Penelitian oleh Putri, Tou, & Eriawan (2020) juga menunjukkan bahwa kelembagaan lokal memiliki kontribusi signifikan dalam proses pengembangan wisata budaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kelembagaan lokal dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Cagar Alam Faruhumpenai, menganalisis kendala dan hambatan yang dihadapi oleh kelembagaan lokal dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Cagar Alam Faruhumpenai, serta menganalisis kegiatan yang telah dilakukan masing-masing kelembagaan dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Cagar Alam Faruhumpenai.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

### *2.1. Waktu dan Tempat*

Studi ini dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2023. Penelitian dan pengumpulan data dilakukan di sekitar Cagar Alam Faruhumpenai yang terletak di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Letak geografis Cagar Alam Faruhumpenai  $02^{\circ} 13' 06''$  –  $02^{\circ} 32' 40''$  Lintang Selatan dan  $120^{\circ} 45' 52''$  –  $121^{\circ} 17' 32''$  Bujur Timur. Luas Cagar Alam Faruhumpenai adalah 90.000 Ha, dengan potensi Cagar Alam Faruhumpenai adalah kawasan konservasi dan sebagai hutan wisata yaitu TWA Danau Matano, TWA Danau Mahalona, dan TWA Danau Towuti.

### *2.2. Alat dan Bahan*

Responden penelitian ini adalah pengurus beserta anggota kelembagaan lokal yang ada di Kecamatan Mangkutana Raya. Alat yang digunakan pada

penelitian meliputi alat tulis, komputer, panduan wawancara, dan kamera.

### 2.3. *Populasi dan Sampel*

Metode penelitian yang diterapkan adalah purposive sampling, yang dipilih untuk mengumpulkan informasi dari anggota kelembagaan lokal yang memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang kegiatan kelembagaannya. Hal ini disebabkan oleh peran kunci anggota kelembagaan dalam penelitian ini. Sebanyak 25 responden dipilih, terdiri dari anggota lama kelembagaan lokal di wilayah hutan Cagar Alam Faruhumpenai. Responden dipilih berdasarkan kriteria yang menjabat dalam kepengurusan kelembagaan.

### 2.4. *Teknik Pengumpulan Data*

#### 1. Pengamatan Langsung

Pengamatan dilakukan terhadap penerapan aturan di kawasan hutan Cagar Alam Faruhumpenai serta peran kelembagaan lokal yang ada di sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan. Pengamatan juga difokuskan kepada kegiatan yang akan dilakukan oleh kelembagaan lokal dalam upaya pelestarian alam.

#### 2. Wawancara

Melakukan wawancara dengan 25 orang responden/informan terkait dengan peran masing-masing kelembagaan lokal dalam pelestarian alam di Cagar Alam Faruhunfenai, Kabupaten Luwu Timur. Responden tersebut adalah ketua lembaga, sekretaris lembaga, dan anggota kelembagaan lokal.

#### 3. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan menggunakan metode ini menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

### 2.5. *Analisis data*

Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan melalui beberapa tahapan. Menurut Cesario (2014) tahapan-tahapan pengolahan data adalah.

1. Pemeriksaan data, tujuan dilakukannya pemeriksaan data untuk mengetahui kelengkapan data dan kepastian data apakah sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Klasifikasi data, dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti
3. Sistemasi data, dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap kelompok. Tujuan dilakukan klasifikasi dan sistemasi data adalah untuk mempermudah pembahasan karena data yang tersusun telah di klasifikasi dan disistemasi sehingga pembahasan data lebih akurat dan sistematis. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Data yang diperoleh dari wawancara diwujudkan dalam bentuk tulisan atau paparan serta ditransformasi ke dalam bentuk tabel dan diagram.
4. Analisis data dilakukan dengan mengolah hasil wawancara dengan responden kemudian ditabulasi dalam bentuk persentase dan dianalisis secara deskriptif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Peran Kelembagaan Lokal dalam Pelestarian Alam

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pengolahan data dijumpai peran kelembagaan lokal dalam pelestarian alam di Cagar Alam Faruhunfenai Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Peran Kelembagaan Lokal**

No	Peran Kelembagaan Lokal	Responden	%
1	Pelaksana Pelestarian	5	20,00
2	Mitra Konservasi	5	20,00
3	Pengamanan Cagar Alam	5	20,00
4	Mitra Pemerintah	10	40,00
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100,00</b>

Tabel 1 memperlihatkan 10 responden dengan persentase (40%) menyatakan peran kelembagaan lokal bermitra dengan pemerintah dalam melestarikan alam, dan 5 responden dengan persentase masing-masing sebesar 20,00% menyatakan peran kelembagaan lokal adalah pelaksana pelestarian alam, merupakan mitra konservasi, dan pengamanan Cagar Alam. Responden dengan peran kelembagaan terbesar yakni pada mitra pemerintah sebesar 40%.

Terdapat 4 (empat) peran kelembagaan lokal dalam melestarikan alam yaitu pelaksana pelestarian alam, mitra konservasi, pengamanan cagar alam, dan mitra pemerintah. Terlihat bahwa peran kelembagaan lokal yang dominan adalah mitra pemerintah, melakukan pengawasan bersama dengan pemerintah setempat, serta menjaga kelestarian alam secara bersama dengan pemerintah.

Mengingat pemuda yang ada di Kabupaten Luwu Timur sangat potensial untuk dirangkul, diajak, dan duduk bersama membicarakan keprihatinan kelestarian alam di Kabupaten Luwu Timur. Pemuda yang potensial ini digerakkan oleh kelembagaan lokal dalam rangka untuk menjaga dan mengamankan lingkungan dari kerusakan akibat bencana alam, tanah longsor, banjir yang kerap kali terjadi setiap tahun. Kondisi sungai di Malili perlu mendapat perhatian pemerintah yang dibantu oleh kelembagaan lokal dalam menangani permasalahan lingkungan alam di sekitarnya.

Sungai Malili dan Sungai Larona sebagai sumber daya listrik untuk wilayah Kabupaten Luwu Timur, menjadi sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan di sekitarnya, terutama kerusakan hutan yang terjadi di bagian hulu yang sekarang ini sudah menjadi lahan perkebunan dan sebagian terkonversi pada lahan sawit, hal ini mempengaruhi kondisi Sungai Larona dan Sungai Malili sebagai sumberdaya alam bagi kehidupan manusia di sekitarnya menjadi terganggu.

Munculnya peran kelembagaan lokal ini sangat diperlukan pemerintah setempat karena kelembagaan lokal tersebut merupakan jembatan koordinasi dengan pemerintah. Kelembagaan lokal tersebut, memfasilitasi Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) dengan Program dan Keegiatannya senantiasa terfokus pada pelestarian alam. Peran kelembagaan mutlak diperlukan pemerintah karena membantu memikirkan kondisi alam demi keselamatan bersama dari terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.

Kawasan Cagar Alam Faruhumpenai merupakan kawasan hutan yang dilindungi Negara, dimana kawasan ini menjadi perhatian oleh kelembagaan lokal untuk selalu dijaga dan diawasi dari kerusakan karena kawasan ini merupakan garda terdepan yang tersisa guna untuk menjaga kelangsungan tata air, tata lingkungan, dan kondisi sungai dari kerusakan agar sumberdaya air sungai tetap terjaga dan warna sungai tetap jernih. Peran kelembagaan ini sebagai motivator dan pendamping pemerintah agar senantiasa terjaga kelestarian sumber-sumberdaya air, sumberdaya hutan, dan sumberdaya lahan.

Sebagai mitra pemerintah dalam pelestarian alam, kelembagaan lokal senantiasa mengkoordinasikan program dan kegiatan OPD setempat yang terkait dengan penanggulangan banjir, tanah longsor, upaya reboisasi pada hutan yang terdegradasi, miskin hara, dan penekanan pengurangan pemberian izin mengusahakan tanaman hortikultura pada lahan dengan kemiringan yang berat, sosialisasi penanggulangan kebakaran, penanggulangan perambahan hutan, pencurian kayu, dan penggembalaan liar. Setiap tahun dilakukan musyawarah desa yang menekankan pada kegiatan kemasyarakatan yang mengikuti kaidah konservasi tanah dan air, hal ini senantiasa didampingi oleh kelembagaan lokal dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan khususnya penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan.

Peran masing-masing kelembagaan lokal ini dalam pelestarian lingkungan seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah secara umum diolah dan ditabulasi dari hasil wawancara dengan responden sehingga disimpulkan jawaban responden sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Sejalan dengan hasil penelitian ini dimana tujuan masing-masing kelembagaan lokal dalam pelestarian lingkungan adalah

memenuhi kebutuhan komunitas anggotanya, sehingga Huda (2020) menyatakan bahwa kelembagaan lokal pada dasarnya merupakan sebuah organisasi yang terbentuk dalam lokalitas tertentu untuk melayani kebutuhan anggotanya. Tujuan utama berdirinya lembaga lokal adalah guna memenuhi kebutuhan komunitasnya secara lembaga dan secara khusus serta menciptakan kesejahteraan di dalamnya.

### 3.2. *Kendala dan Hambatan*

Berdasarkan pada hasil pengolahan dan tabulasi data responden, diketahui kendala dan hambatan kelembagaan lokal dalam melestarikan alam di Cagar Alam Faruhunfenai Kabupaten Luwu Timur dengan data disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Kendala dan Hambatan**

No	Kendala dan Hambatan	Responden (Org)	%
1	Sumber Daya Manusia	5	20
2	Perbedaan Pendapat	5	20
3	Tantangan Di Era Digital	5	20
4	Tantangan Egoism	5	20
5	Kurangnya Dukungan Dana	5	20
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100</b>

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, terlihat bahwa terdapat 25 responden dimana masing-masing 5 responden dengan persentase 20,00% yang memiliki hambatan pada Sumber Daya Manusia, perbedaan pendapat, tantangan di era digital, tantangan egoism, serta kurangnya dukungan dana. Berdasarkan pada data tersebut memperlihatkan bahwa responden dengan peran lembaga sebagai Mitra Pemerintah lebih dominan dari pada peran lembaga yang lainnya.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh kelembagaan lokal dalam melakukan pelestarian alam, yaitu terkait dengan kapasitas sumberdaya manusia, senantiasa terjadi perbedaan pendapat, tantangan di era digital, tantangan egoism, dan kurangnya dukungan dana. Berdasarkan data tersebut, tercermin adanya kekurangan terutama bagi anggota lembaga yang kurang memiliki sumberdaya

manusia yang potensial dalam pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam memahami pentingnya pelestarian alam. Sehingga sulit memahami alam, menterjemahkan lingkungan yang sehat, bersih, dan alami.

Sumberdaya manusia yang menggerakkan roda organisasi kelembagaan lokal, terlihat dari rendahnya pendidikan para anggota organisasi, yaitu hanya rata-rata berpendidikan sekolah menengah atas, dan sedikit yang berpendidikan sarjana. Sumberdaya manusia yang direkrut oleh lembaga lokal karena mereka sulit merekrut sumberdaya manusia dari luar daerah, karena menyangkut soal pendanaan, terutama mereka yang tergabung ke dalam lembaga lokal tersebut memerlukan biaya hidup keluragnya, sedangkan lembaga lokal tidak menyediakan biaya hidup tersebut. Untuk mengantisipasi lembaga lokal berjalan dengan baik maka harus mencari sumberdana dari luar daerah bahkan memohon bantuan nasional maupun internasional.

Kendala lainnya adalah kerap terjadi perbedaan pendapat diantara para anggota, anggota lembaga lokal dalam hal perbedaan pendapat itu hal yang lumrah, namun mereka tidak saling menyerang dengan pendapat yang keliru. Dalam organisasi hal itu biasa terjadi, namun tidak sampai permasalahan terjadi berlarut-larut, perbedaan pendapat dalam berorganisasi hanya terjadi dalam diskusi, namun setelah di luar forum, maka mereka saling merangkul.

Kendala lainnya adalah kurangnya pengetahuan tentang teknologi informasi, kerap anggota bingung memanfaatkan teknologi informasi yang kurang dipahami dan dijalankan oleh para anggota karena mereka sendiri belum mengetahui secara luas penggunaan teknologi informasi itu. Rata-rata yang menjadi anggota lembaga lokal adalah para ibu dan bapak yang tidak mengerti teknologi informasi, sehingga sulit menggunakan teknologi informasi yang serba digital.

Kendala dan hambatan masing-masing kelembagaan lokal dalam pelestarian kawasan konservasi di Kabupaten Luwu Timur tidak semuanya sama, namun kendala dan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing kelembagaan lokal

tersebut adalah secara umum jawaban masing-masing responden yang telah diolah dan ditabulasi sehingga dapat disimpulkan seperti pada Tabel 2.

### 3.3. Upaya yang Dilakukan Kelembagaan Lokal dalam Pelestarian Alam

Berdasarkan pada hasil pengolahan dan tabulasi data responden, diketahui responden berdasarkan upaya yang dilakukan kelembagaan lokal dalam melestarikan Cagar Alam Faruhumfenai di Kabupaten Luwu Timur dengan data disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Upaya yang dilakukan Kelembagaan Lokal**

No	Upaya	Responden	%
1	Sosialisasi	9	36,00
2	Penanaman Pohon	7	28,00
3	Aksi Bersih	6	24,00
4	Observasi Skala Kecil	3	12,00
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan pada Tabel 3 tersebut, terlihat bahwa terdapat 9 responden dengan persentase sebesar 36,00% adalah reponden dengan upaya sebagai sosialisasi, 7 reponden dengan persentase 28,00% melakukan upaya dengan penanaman pohon, 6 responden dengan persentase 24,00% melakukan upaya dengan aksi bersih, dan 3 responden dengan persentase 12,00% responden melakukan upaya dngan observasi skala kecil.

Upaya yang telah dilakukan oleh kelembagaan lokal dalam pelestarian alam lingkungan adalah sosialisasi, penanaman pohon, aksi bersih, dan observasi skala kecil. Sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh kelembagaan lokal adalah sosialisasi penanggulangan banjir, penanggulangan tanah longsor, sosialisasi penggunaan tanah pada kelerengan berat, sosialisasi pentingnya penanaman pohon, sosialisasi penanaman hutan mangrove.

Upaya penanaman yang dilakukan oleh kelembagaan lokal bersama pemerintah dan masyarakat untuk memperkaya tanaman pohon dalam kawasan

Cagar Alam Faruhumpenai, untuk menambah fungsi ekologi yaitu untuk mengatur tata air dan menciptakan iklim mikro. Termasuk aksi bersih yaitu melakukan penataan kawasan sempadan sungai dengan mengatur tata fungsi sempadan sungai, dan menanami pohon yang dapat menahan air yaitu pohon sukun dan terap di sempadan sungai.

#### **4. KESIMPULAN**

Peran kelembagaan lokal dalam pelestarian kawasan hutan Cagar Alam Faruhumpenai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur adalah melakukan sosialisasi dan penanaman pohon pada kawasan Cagar Alam Faruhumpenai sebagai mitra pemerintah dalam pelestarian alam. Hambatan yang dihadapi oleh kelembagaan lokal dalam pelestarian alam kawasan hutan Cagar Alam Faruhumpenai adalah kurangnya kapasitas sumberdaya manusia, kerap terjadi perbedaan pendapat, kurangnya pengetahuan tentang teknologi informasi di era digital, terjadinya tantangan egoism, dan kurangnya dukungan dana. Upaya yang telah dilakukan oleh kelembagaan lokal dalam pelestarian kawasan hutan adalah sosialisasi penanggulangan banjir dan tanah longsor, penanaman tanaman pohon di kawasan, melakukan aksi bersih dengan penataan sempadan sungai.

#### **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak LSM Kabupaten Luwu Timur yang telah bersedia dan membantu dalam pemberian data terkait peran kelembagaan lokal dalam pelestarian Cagar Alam di Kabupaten Luwu Timur, serta seluruh pihak yang terlibat dalam membantu penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Baccini, L., & Koenig-Archibugi, M. (2014). *Why do states commit to international labor standards? Interdependent ratification of core ILO conventions, 1948–2009*. *World Politics*, 66(3), 446-490.

Cesario, A. E. (2014). *Partisipasi Kelompok Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 62 hlm.

Huda, R. (2020). *Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga*. *Aspirasi: Jurnal MasalahMasalah Sosial*. Volume 11, No. 2 Desember 2020.

Maria, G., Darwis, R. (2022). *Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Jawa Barat*. *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, Universitas Padjadjaran. September 2022, Hal: 379-385.

Putri, S. I., Tou, J. H., & Eriawan, T. (2020). *Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengembangan Wisata Budaya di Nagari Pariangan*. *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa PWK ke73* Vol. 1 No. 3.

Rani, F., & Angraini, D. (2015). *Kerjasama United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dengan Indonesia dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Pangandaran, Jawa Barat Tahun 2011- 2013* (Doctoral dissertation, Riau University).

Suryaningsih, O & Nugraha, J. T. (2018). *Peran Lembaga Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Wanurejo dan Dampaknya terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal*. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, Vol. 2 No. 1.